

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Di Desa Pagerandong, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga perempuan hampir selalu terlibat dalam tiap kegiatan dalam tahapan perencanaan dan terlibat dalam struktur kelembagaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO), yaitu sebanyak 30 persen. Dari sisi ini, implementasi PUG tampak telah membawa cukup hasil di mana perempuan telah terlibat dalam program pemerintah. Namun demikian jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki, maka jumlah perempuan dalam setiap kegiatan belumlah seimbang dan belum menempati posisi-posisi strategis dalam struktur kelembagaan Pamsimas. Di samping itu, dalam forum-forum resmi yang didominasi oleh laki-laki partisipasi perempuan berupa partisipasi pasif, di mana mereka jarang memberikan saran, usulan, maupun kritik atas program yang tengah berjalan. Akses, pengambilan keputusan dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Di sisi lain, perbedaan aspirasi, skala prioritas, dan kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan belum menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan anggaran maupun aksi-aksi dalam Pamsimas. Dengan demikian dalam konteks PUG bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan dan laki-laki dalam Pamsimas, maka implementasi PUG dalam tahap perencanaan di Desa Pagerandong belumlah optimal.

Dari seluruh uraian pembahasan mengenai implementasi PUG, peneliti menemukan bahwa implementasi PUG pada tahap perencanaan Pamsimas di Desa Pagerandong yang belum optimal tidak terletak pada persoalan manajemen atau persoalan rendahnya sumber daya manusia sebagaimana banyak diurai dalam penelitian sebelumnya. Tidak optimalnya implementasi PUG tersebut *pertama* dikarenakan masih adanya dikotomi antara ruang publik-domestik. Air dan sanitasi

adalah persoalan yang selalu bersinggungan dengan wilayah domestik namun selama ini penyelesaiannya berada dalam wilayah publik, di mana perempuan seolah teralienasi ketika masuk ruang publik tersebut. Pada saat yang sama, peran perempuan dalam wilayah privat/domestik yang dianggap sepele dan remeh temeh sesungguhnya memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah air. Di Desa Pagerandong, perempuan melakukan manajemen air dengan baik di lingkungan rumah tangganya dan menggunakan pengetahuan alaminya untuk mendapatkan air yang sehat dan cara-cara mempertahankan kesehatannya.

Kedua adalah terbatasnya pemahaman pelaksana atas substansi PUG. Pelaksana pada tingkat lapangan seperti DPMU, LKM, dan fasilitator/konsultan program mempunyai keleluasaan dalam menterjemahkan makna pengarusutamaan gender sekaligus paling banyak berinteraksi dengan kelompok sasaran. Namun pemahaman yang terbatas menyebabkan elaborasi PUG terbatas pada teks mengenai batas minimal keterlibatan perempuan dalam program atau sekedar menilai PUG dari sisi kuantitas. Dukungan terhadap PUG dengan menitikberatkan pada kuantitas perempuan dalam kegiatan maupun kelembagaan belum menyentuh substansi PUG. Kebijakan PUG hendaknya dimaknai sebagai upaya strategis yang selalu beririsan dengan persoalan lainnya, dan menghargai setiap peran gender sepanjang dilakukannya sebagai sebuah pilihan dan kesadaran, bukan karena dominasi. Untuk itu, persoalan keterbatasan air bersih dan sarana sanitasi juga tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan ketiadaan sarana fisik, melainkan selalu berkaitan erat dengan persoalan lingkungan, budaya, dan juga kesehatan.

Ketiga adalah karena rendahnya dukungan politik dari elit. Kegiatan Pamsimas di Desa Pagerandong dilaksanakan ketika desa tengah bersiap menghadapi pergantian kepala desa. Polarisasi terjadi dalam masyarakat, maupun tubuh pemerintahan dan lembaga-lembaga desa sehingga pada tahapan awal program Pamsimas dukungan lebih bersifat per individu. Hal ini berakibat LKM dan satlak yang terbentuk di tengah-tengah polarisasi tersebut pun terbelah dan bekerja dalam suasana yang kurang kondusif. Pada saat yang sama desa tidak mempunyai tokoh yang cukup

kharismatik yang mampu menyeimbangkan antara politik dan program. Pada akhirnya, PUG di awal pelaksanaan kegiatan di Desa Pagerandong lebih mengarah pada pelaksanaan formalitas saja, namun semangat dan substansi PUG sebagai upaya pemberdayaan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan masih jauh dari harapan.

Keempat, lunturnya kearifan lokal yang memberi makna tinggi terhadap perempuan dan pelestarian lingkungan. Hal ini misalnya, ritual untuk memberikan penghormatan kepada pohon maupun sumber mata air yang sesungguhnya dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan air, tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat. Begitupun ritual lainnya seperti larung ke sungai atau mendatangi makam-makam leluhur pada waktu-waktu tertentu, di mana perempuan mempunyai peranan penting dalam ritual-ritual tersebut, tak lagi banyak ditemukan di lingkup masyarakat Pagerandong.

Kelima, masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap para pelaksana beserta kebijakan publik yang diusungnya. Warga baik laki-laki maupun perempuan bahkan menganggap bahwa para pelaksana lapangan ini merupakan perwakilan dari pemerintah, merupakan elit program yang begitu eksklusif dan sulit dijangkau, sehingga kelompok sasaran yang semestinya aktif berpartisipasi kenyatannya banyak yang menolak untuk melibatkan diri dalam program, atau justru meminta upah atas keterlibatannya di dalam program. Masyarakat menganggap bahwa Pamsimas merupakan proyek segelintir orang –bukannya program pemerintah yang seyogyanya melibatkan masyarakat secara penuh— dan merupakan proyek milik elit laki-laki. Krisis kepercayaan tersebut terjadi karena selama ini terdapat jarak antara warga dan implementor kebijakan yang dianggap sebagai wakil negara; di mana warga dianggap sebagai obyek pembangunan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam program.

Pada ujung yang lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi PUG di Desa Pagerandong. Faktor pendukung yang *pertama* adalah meskipun dikotomi publik-domestik masih kentara, namun sesungguhnya dikotomi tersebut bersifat lentur dan dapat dinegosiasikan. Di Desa Pagerandong, perempuan dapat mengambil keputusannya dengan lebih leluasa melalui forum informal yang

seringkali dianggap sebagai wilayah perempuan, seperti pengajian dan arisan. Keputusan yang diambil perempuan lebih banyak pada bidang kesehatan, seperti menentukan lokasi promosi kesehatan/pemicuan, menentukan anggaran kesehatan, dan menentukan strategi untuk peningkatan akses sanitasi. Dalam hal ini, perempuan tidak harus selalu dipaksa masuk dalam ruang-ruang publik di mana masih terjadi dominasi. Justru, para implementorlah yang hendaknya masuk dalam ruang-ruang di mana perempuan merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi mengenai pengalaman, kebutuhan, dan menyampaikan semua aspirasinya.

Faktor *kedua* sebagai pendukung dalam implementasi PUG adalah sikap masyarakat yang relatif terbuka terhadap isu kesetaraan. Sekalipun apatis dalam hal keswadayaan dan pekerjaan-pekerjaan menyangkut teknik dan anggaran dalam Pamsimas, namun masyarakat tidak menolak gagasan bahwa perempuan harus banyak terlibat dalam program dan memberikan keputusan-keputusan pentingnya, serta memperoleh manfaat yang sama dengan laki-laki dalam Pamsimas. Tidak ada tabu ataupun mitos-mitos yang berkembang di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelarangan perempuan untuk turut serta dalam ranah publik. Perempuan juga banyak terlibat dalam beberapa kegiatan yang minim konflik kepentingan dan tidak berkaitan dengan banyak anggaran, seperti promosi kesehatan dan pemicuan untuk stop buang air besar.

Faktor pendukung *ketiga* adalah respon positif dari para pelaksana terhadap kebijakan PUG. Sebagian besar pelaksana menyatakan menerima PUG karena menyadari bahwa selama ini perempuan belum banyak terlibat dalam program pemerintah, sehingga dengan demikian diperlukan upaya afirmatif untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam setiap proses Pamsimas, dengan jumlah sebanyak 30 persen dalam setiap kegiatan.

B. Saran

Sebagai sebuah kebijakan yang bersifat protektif terhadap kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan, PUG yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan dalam implementasinya membutuhkan persamaan makna dan persepsi mengenai PUG itu sendiri. PUG dilaksanakan dengan upaya afirmasi, dengan mendorong perempuan untuk terlibat dalam setiap tahapan program. Kebijakan PUG tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dan beririsan dengan program ataupun kebijakan lainnya. Untuk itu dalam implementasinya PUG perlu didukung dengan aksi-aksi yang tidak hanya bersifat praktis namun juga menyentuh substansi PUG, antara lain :

- a. Perlu adanya penguatan pemahaman mengenai PUG dalam program Pamsimas terutama terhadap para pelaksana tingkat bawah sebagai aktor kunci dalam implementasi PUG, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam menterjemahkan PUG, dengan demikian implementasinya di masa depan lebih optimal.
- b. Terus menerus dilakukan dialog antara pelaksana dengan masyarakat melalui pertemuan maupun diskusi yang intensif mengenai PUG, sehingga masyarakat merasakan pentingnya dan merasa ikut memiliki program, tidak mudah terpengaruh oleh kondisi-kondisi dari luar seperti adanya gejolak politik yang terjadi di sekitarnya. Dialog juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik dan pelaksana.
- c. Seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga-lembaga, termasuk lembaga non pemerintah, dan masyarakat juga perlu untuk saling berdialog dan mengembangkan sebuah model kerjasama untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat terutama perempuan mempunyai nilai tawar yang tinggi dalam implementasi.
- d. Mengembangkan kerjasama lebih luas lagi sehingga semakin banyak *stake holder*, termasuk dengan dinas terkait lingkungan, budaya, dan masyarakat di luar

kelompok sasaran dan lembaga-lembaga non pemerintah sebagai kelompok penyeimbang sehingga terjadi transparansi dalam implementasi PUG.

- e. Setiap kegiatan dalam Pamsimas dimulai dari sosialisasi program hingga pengelolaan sebaiknya dilakukan dengan mengundang lebih banyak kelompok-kelompok perempuan, atau dilakukan dalam forum-forum yang seringkali dihadiri oleh perempuan, misalnya pengajian, arisan, atau PKK.

